

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Penelitian ini mendalami tentang pemikiran Presiden Soekarno tentang demokrasi terpimpin dan pelaksanaan ketatanegaraan ketika penerapan demokrasi terpimpin. Kesimpulan umum dari penelitian ini adalah demokrasi terpimpin bagi Presiden Soekarno merupakan suatu demokrasi yang berdisiplin, satu demokrasi yang sesuai dengan dasar hidup bangsa Indonesia yaitu gotong royong, satu demokrasi yang membatasi diri sendiri kepada tujuan yang satu, satu demokrasi *met leiderschap*, suatu demokrasi yang mengandung manajemen di dalamnya kearah tujuan yang satu, yaitu masyarakat keadilan sosial. Konsep demokrasi terpimpin ini merupakan jalan keluar dari permasalahan yang ada dalam pemerintahan dan sistem politik yang ada, disamping penerapan demokrasi sebelumnya yang mengutamakan kebebasan. Pelaksanaan ketatanegaraan yang diterapkan pemerintah sebagai akibat dari pelaksanaan demokrasi terpimpin terdapat beberapa yang inkonstitusional atau penyelewengan diantaranya pembubaran DPR hasil pemilu serta pembentukan lembaga-lembaga negara seperti MPRS, DPR GR dan DPAS melalui Penetapan Presiden. Adapun kesimpulan khusus adalah sebagai berikut :

1. Presiden Soekarno merupakan pemimpin yang memiliki kharismatik hal ini dibuktikan dengan banyaknya literatur yang menulis biografi Presiden Soekarno. Namun perubahan sikap yang terjadi pada Presiden Soekarno mulai terlihat ketika tahun 1957, pada waktu itu beliau pertama kali mengemukakan gagasan Demokrasi Terpimpinnya. Gagasan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno ini dinilai lebih ke arah otoriter. Hal ini dibuktikan dalam tahun selanjutnya yaitu pada tahun 1958, kekuasaannya semakin menjangkau banyak bidang kegiatan. Namun sangat sulit untuk menentukan sistem apa yang digunakan saat itu. Jika dilihat dari tiga tolak ukur untuk membuktikan hal ini, pertama, jangkauan penggunaan kekuasaan pemerintah yang berarti seberapa banyak aspek kegiatan rakyat dipengaruhi oleh keputusan-keputusannya. Kedua, bobot kekuasaan itu, berarti seberapa

intensitas keputusan itu mempengaruhi aspek-aspek ini. Ketiga, konsentrasi kekuasaan tersebut, berarti seberapa jauh pelaksanaan keputusan itu terbagi.

2. Lembaga-lembaga negara ketika pelaksanaan demokrasi dipimpin mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, dimana terdapat Presiden, Wakil Presiden serta Menteri, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung. Beberapa lembaga negara belum terbentuk kecuali DPR hasil pemilu tahun 1955, kemudian timbul sebuah penyelewengan Presiden untuk membentuk beberapa lembaga yang belum ada melalui Penetapan Presiden, diantaranya : MPRS, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Selain lembaga negara yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno pun membentuk beberapa lembaga yang diamanatkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diantaranya : Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan), Front Nasional. Peran eksekutif atau presiden sangatlah besar dalam pelaksanaan ketatanegaraan, seluruh lembaga negara yang ada tentu dalam campur tangan pemerintah. Bukan hanya ketika pembentukan, namun pelaksanaan selama kurang lebih enam tahun kepemimpinan Presiden Soekarno pun dipengaruhi oleh pemerintah karena dalam tugas dan wewenang setia lembaga terdapat campur tangan pemerintah.
3. Peraturan mengenai kepartaian, berdasarkan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian, dan tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai, berdasarkan Peraturan Presiden, No. 13 tahun 1960, merupakan awal dari gejolak politik di dalam partai politik, dimulai dari pembubaran beberapa partai besar dengan alasan terlibat pemberontakan seperti Masyumi. Saat itu hanya mengakui sepuluh partai diantaranya PNI, NU, PKI, Partai Khatolik, Partindo, Partai Murba, PSII, IPKI, Parkindo, dan Perti. Dari kesepuluh partai tersebut merupakan partai yang memenuhi kriteria. PKI menjelma menjadi partai besar yang terus menempel pada Soekarno. Maka disini terjadi interaksi tiga kekuatan yang mengakibatkan terjadinya tarik menarik kekuatan antara tiga kubu (Soekarno, PKI dan Angkatan Darat). Akhir dari peristiwa ini berakhir pada kudeta yang gagal yang kemudian dikenal sebagai G30S/PKI. Setelah kudeta ini otomatis

kekuasaan yang melekat pada Presiden Soekarno merosot tajam. Sehingga satu-satunya yang menjadi aktor pemenang diantara tarik menarik tiga kekuatan itu adalah Angkatan Darat.

4. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1966, meskipun bisa dikatakan masa otoriternya Presiden Soekarno namun terdapat beberapa catatan sejarah yang dikenang sampai saat ini diantaranya adalah pembebasan Irian Jaya, yang dilakukan melalui beberapa jalur yaitu diplomasi dan militer. Kemudian dalam menanggapi perang dingin Negara Indonesia memilih untuk tidak berada dalam salah satu blok, artinya memilih non-blok. Sampai saat ini menjadi landasan politik luar negeri yaitu bebas aktif dan tidak memihak kepada salahsatu blok yang ada.
5. Masa demokrasi terpimpin memiliki makna yang sangat mendalam terutama dari segi historis, bisa dikatakan masa otoriternya pemerintahan pertama kali. Dalam hal ini penulis menjabarkan bukan hanya pemikiran dan praktik ketatanegaraan saja, tetapi juga dampak bagi Pendidikan kewarganegaraan. Tentu setiap masa pasti mengandung makna, disini demokrasi terpimpin tampil sebagai pengisi sejarah ketatanegaraan yang otoriter. Tentu bisa dijadikan sebuah gambaran untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

B. Implikasi

Implikasi yang dapat peneliti sampaikan setelah melakukan penelitian ini adalah :

1. Pemikiran Presiden Soekarno memiliki kontribusi yang besar terhadap demokrasi yang kita laksanakan saat ini. Diluar pelaksanaan demokrasi terpimpin konsep Presiden Soekarno sangat diperhatikan, yang menjadi khas corak pemikirannya adalah originalitas, dalam mengemukakan gagasan berdasar pada budaya bangsa yang ada, tidak heran lagi ketika organisasi-organisasi Nasionalis dan Marhaenisme masih berkiblat kepada pemikiran Presiden Soekarno.
2. MPRS merupakan lembaga negara yang terbentuk pertamakali oleh Penetapan Presiden Soekarno, sebelumnya MPR hanyalah sebuah konsep,

dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun dicantumkan namun sebelum itu belum ada lembaga MPR dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

3. Dari kajian ini akan memperluas literatur mengenai demokrasi terpimpin terutama dalam segi konsep dan pelaksanaan ketatanegaraan.

C. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan setelah melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk Pembuat Kebijakan

- a. Pelaksanaan demokrasi saat ini yang sedang berlangsung memerlukan perbaikan kembali demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Jangan menghilangkan sejarah pelaksanaan demokrasi yang buruk, namun dari hal itulah tersimpan bahan evaluasi untuk perbaikan sistem demokrasi.
- b. Hilangkan praktik KKN (Korupsi, kolusi dan Nepotisme) yang selama ini merambah dimana-mana, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan bisa optimal.
- c. Peningkatan pengawasan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah supaya merata di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Menanggapi berkembangnya isu amandemen ke-5 UUD NRI 1945, dalam melakukan perubahan tentunya harus lebih progresif berfikir kepada hal yang lebih memajukan bangsa bukan kembali kepada masa otoriter, pengawasan harus lebih dipertegas dari segi kewenangan harus lebih diperinci.

2. Untuk Lembaga Pendidikan

- a. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dalam mengkaji pemikiran para tokoh-tokoh perjuangan Indonesia, oleh karena itu dukungan dari lembaga pendidikan harus optimal dalam memberikan pengetahuan dasar atau lanjutan kepada masyarakat.
- b. Jumlah penelitian mengenai pemikiran harus lebih ditingkatkan guna menambah literatur dan memperkaya sumber.

3. Untuk Peneliti Berikutnya

- a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber kajian keilmuan mengenai konsep demokrasi terpimpin bagi peneliti berikutnya.
- b. Penelitian ini bisa dikembangkan kedalam penelitian lanjutan lainnya, karena pemikiran Soekarno sangatlah banyak dan menarik untuk dikaji terutama jika dibandingkan dengan kondisi saat ini.

4. Untuk Masyarakat

- a. Dalam memperjuangkan kemerdekaan diperlukan banyak pengorbanan, apalagi dalam mempertahankan kemerdekaan. Maka kita sebagai generasi penerus harus menghargai dan meneladani berbagai tokoh perjuangan yang mengorbankan berbagai hal dalam kemajuan bangsa.
- b. Demokrasi saat ini sudah diraih, namun dalam mengembangkan harus terus dilakukan guna mempersatukan seluruh lapisan yang ada di dalam masyarakat.